

EFISIENSI SISTEM *E-PROCUREMENT* DALAM PELELANGAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA (STUDI KASUS: DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BALI)

Fransiskus Claudy¹⁾, Piers Andreas Noak²⁾, I Ketut Winaya³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: claudyfransiskus@gmail.com, piers_noak@yahoo.com, ketutwinaya14@yahoo.com

ABSTRACT

E-procurement system in the procurement of government goods / services is essential to improve the efficiency of the procurement process, this is the purpose and principles of procurement process government goods / services, including the Public Works Department of Bali Province as one SKPD Bali Province who have used the e-procurement system in the procurement process. The purpose of this study was to determine the efficiency as well as the constraints of e-procurement system in the procurement of government goods / services performed particularly of Public Works Department of Bali Province. This type of research is using descriptive qualitative approach. Source data used are primary data and secondary data. The results of the analysis of the findings and conclusions of research are e-procurement system in the procurement of goods / services conducted by the Public Works Department of Bali Province has been run in full and more efficient than the conventional way. This is evidenced by the results of the field survey and data procurement conducted by the Public Works Department of Bali Province in particular prone years. But it need to increase the use of electronic systems in other procurement methods, as well as the development of the server to operate the system that are not easily hacked or suffer other server error, given the e-procurement system based online. So that in the future, e-procurement system will be more efficient and transparent in accordance with the principles and objectives.

Keywords: E-procurement, procurement of goods / services, efficiency

1. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada dasarnya untuk mewujudkan segala kebutuhan pemerintahan dalam hal barang/jasa sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu. Pengadaan barang/jasa pada awalnya dilakukan secara konvensional/manual. Pihak pengada barang/jasa akan melakukan pengumuman langsung serta dilakukan oleh lembaga atau badan yang bersangkutan yang akan melakukan pengadaan, dan penyedia barang/jasa akan mendatangi langsung badan atau lembaga yang bersangkutan.

Kemajuan teknologi menghasilkan suatu sistem baru yang disebut *e-procurement*. Sistem *e-procurement* atau pengadaan secara elektronik ini hampir sama prosesnya seperti sistem konvensional/manual namun dilakukan secara *online* melalui website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Sistem *e-procurement* bertujuan agar dapat meningkatkan efisiensi pengadaan, sesuai dengan salah satu prinsip pengadaan.

Pengadaan dapat dikatakan efisien jika dilihat dari beberapa aspek pnying seperti biaya dan waktu. Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali sistem *e-procurement* bias dikatakan hal yang baru. Karena baru pada tahun 2014 sistem ini digunakan secara menyeluruh dan dilakukan secara baik. Peralihan dari sistem konvensional menuju sistem elektronik dalam pengadaan barang/jasa sangatlah penting. Maka perlu adanya analisa sistem dan proses

pengadaan yang baru ini di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. Dilansir dari data LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali memiliki sekitar 188 paket pengadaan pada tahun 2015 saja, baik pengadaan barang, jasa, atau jasa lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dalam penelitian ini ingin menganalisa lebih dalam mengenai permasalahan yang terjadi dalam proses pengadaan baik secara manual maupun elektronik atau sistem *e-procurement*, serta tingkat efisiensi baik sebelum melalui sistem *e-procurement* dan setelah adanya sistem baru tersebut. Melatarbelakangi hal tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul "**Efisiensi Sistem E-Procurement dalam Pelelangan Umum Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali)**".

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik dibuat dalam kerangka "untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan." Kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan (Widodo 2011: 14).

Konsep E-Procurement

E-Procurement merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi (Croom dan Jones, 2007).

Efisiensi

Menurut Usman (2011) menerangkan tentang efisien (daya guna) adalah proses penghematan 7M+1H dengan cara melakukan pekerjaan dengan benar (*do things right*). Sedangkan 7M+1H merupakan sumber daya yaitu (*man, money, material, machines, methods, marketing, and minutes + informasi*).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Sumber melalui data primer dan data sekunder. Unit analisa dalam penelitian ini adalah organisasi, yang mencakup Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali. Teknik penentuan informan, yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu teknik *Purposive Sampling* (Teknik sampling bertujuan) dan *snowball sampling*. Metode atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan metode kepustakaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Sistem E-Procurement Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pembaharuan aturan dan teknis pengadaan tidak merubah prinsip pengadaan yang salah satunya yaitu meningkatkan efisiensi. Sehingga pada tahun 2008 Pemerintah mulai mengusulkan proses pengadaan menggunakan sistem elektronik, mengingat kemajuan teknologi semakin canggih dan meningkatkan efisiensi serta transparansi pengadaan.

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dengan adanya sistem *e-procurement* segala proses pelelangan diserahkan kepada pihak ULP untuk diproses, sedangkan Dinas PU Provinsi Bali bertugas merencanakan pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa melalui sistem *e-procurement*. Waktu pengadaan juga akan lebih cepat, karena tahapan dalam proses pengadaan dengan adanya sistem yang baru telah menggunakan sistem *online* yang bisa diakses 24 jam agar masyarakat juga dapat melihat pengumuman lelang. Sistem elektronik dalam pengadaan juga mengurangi biaya di luar anggaran pengadaan seperti biaya pencetakan dokumen, karena seluruhnya diakses secara online.

Senyatanya proses pengadaan secara konvensional berdasarkan hasil temuan wawancara dengan narasumber, pengadaan lebih lama memakan waktu dan biaya seperti pembuatan dokumen yang masih berbentuk kertas. Kebijakan yang dibuat bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut, mengingat permintaan akan barang/jasa terus meningkat dan berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga membutuhkan

suatu proses yang cepat, tepat dan efisien tanpa menambah beban biaya yang ada.

Evaluasi Proses Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem *E-Procurement*

Lewat Peraturan atau kebijakan yang mengatur tentang pengadaan secara elektronik tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali sebagai pengguna anggaran wajib melakukan pengadaan sesuai aturan yang berlaku. Aturan tersebut mewajibkan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali menggunakan sistem pengadaan elektronik, atau yang disebut *e-procurement*. Sesuai dengan hasil temuan, penggunaan sistem elektronik dalam pengadaan barang/jasa dilakukan secara penuh pada tahun 2010. Di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali baru dilakukan percobaan penggunaan sistem *e-procurement* pada Tahun 2009 dengan pengadaan 2 paket. Namun karena merupakan hal yang baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sehingga paket-paket pengadaan secara elektronik di tahun 2010 sampai dengan 2013 belum di arsipkan secara baik dan tidak dapat di masukan ke dalam penelitian.

Sistem *e-procurement* ini juga mewujudkan transparansi pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan adanya pengumuman lelang melalui *website* LPSE, yang berdomain lpse.baliprov.go.id secara lengkap dan terbuka kepada

masyarakat, tanpa harus masyarakat datang ke Dinas terkait. Salah satu tahap penting dalam pelelangan yaitu tahap penjelasan (*aanwijzing*). Dengan adanya sistem *e-procurement*, pihak panitia pengadaan tidak lagi bertemu langsung dengan pihak peserta, ini merupakan cara antisipasi pemerintah dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang sering terjadi kasus korupsi. Melalui sistem aplikasi SPSE yang merupakan aplikasi dalam proses *e-procurement*, menjadikan proses penjelasan pelelangan lebih cepat dan dapat dilakukan penjelasan lebih dari 5 paket dalam 1 hari sedangkan berbeda dengan sistem konvensional yang memakan waktu lebih banyak dalam tahap penjelasan.

Secara garis besar pengadaan barang/jasa yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali telah menggunakan sistem *e-procurement*. Seperti yang dijelaskan dalam hasil temuan, sistem tersebut sangat membantu Dinas Pekerjaan Umum dalam meningkatkan efisiensi pengadaan. Pada dasarnya proses dan tahapan pengadaan barang/jasa dengan *e-procurement* hampir sama. Proses pengadaan barang/jasa bisa disimpulkan terdapat 2 tahapan besar yaitu perencanaan dan pelelangan. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali tidak lagi melakukan tahapan pelelangan karena sudah adanya pembagian tugas kepada pihak ULP dalam tahapan tersebut. Sistem *e-procurement* sendiri dikelola oleh LPSE melalui aplikasi SPSE. Walaupun sistem elektronik ini bisa dikatakan

hal baru, namun jumlah pengadaan yang gagal lelang atau batal lelang di tahun 2014 sampai saat ini terus berkurang dan membuktikan bahwa sumber daya manusia dalam melakukan sistem baru ini sangat baik.

Sebuah manajemen yang baik terdapat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Sistem informasi manajemen memiliki kelengkapan fisik seperti, perangkat keras dan perangkat lunak atau server. Pengaplikasian sistem informasi manajemen melalui *e-procurement* menjadikan suatu pengadaan lebih efisien dan dapat dikendalikan dengan lebih baik karena semua tergabung melalui server.

5. KESIMPULAN

Sistem *e-procurement* sebagai sistem baru dalam pengadaan barang/jasa, ikut membantu Dinas PU Provinsi Bali untuk mewujudkan pengadaan lebih efisien dan transparan, sesuai dengan tujuan dari Peraturan Presiden dan Undang-Undang yang berlaku. Namun sistem *e-procurement* ini harus tetap dikembangkan sehingga pengadaan dapat lebih transparan dan menjangkau seluruh penyedia barang/jasa dan menghidupkan usaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat ikut bagian dalam pengadaan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahab, Solichin. (1991). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Davis, G.B. (1985). *Kerangka Dasar: Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

Nas ucha, Chaizi. (2004) *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*. Jakarta: Grasindo

Pasolong, Harbani. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Ramli, Samsul. (2014). *Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: visimedia.

Sutedi, Adrian. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika.

Terry, G.R., Rue, L.W. (1985). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara.

Jurnal/Karya Ilmiah

Abidin, Nanan. (2011). *Optimalisasi Pengembangan E-Procurement pada Sistem Pelelangan Umum Pascakualifikasi Dengan Satu Sampul dan Sistem Gugur (Konsep dan Desain Pengembangan sebagai Fungsi Kontrol) Studi Kasus di Kementerian Pekerjaan Umum*. Jurnal Tesis Universitas Gunadarma.

Croom, S. dan Brandon-Jones, A. (2007). *Impact of E-Procurement: experience from implementation in the UK public sector*. *Journal of Purchasing & supply Management*. Volume 13, halaman 294-303.

Damayanti, A.I., Domai, T., Wachid, A. (2013). *Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Malang (Studi Pada Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Universitas Brawijaya. Volume 1, Nomor 2, Halaman 139-146.

Engström, Anne., Wallström, Åsa., Salehi-Sangari, Esmail. (2009). *Implementation of Public E-Procurement in Swedish Government Entities*. Proceedings of the International Multiconference Computer Science and Information Technology. Volume 4. Halaman 315-319.

Haryati, Dwi., Anditya Anugrah., Wibowo, R. A. (2011). *Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-*

- Procurement) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.* Jurnal Mimbar Hukum volume 23, nomor 2, Juni 2011, halaman 237-429.
- Rahayu, T.P., Saleh, C., Prasetyo, W.Y. (2013). *Implementasi Kebijakan E-Procurement Untuk Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi (Studi pada PT. PLN (persero) area Malang).* Jurnal Administrasi Publik (JAP), volume 1, nomor 2, halaman 290-298.
- Siahaan, A.Y., Trimurni, F. (2014). *E-Procurement Policy Model: Striving towards Transparency in Goods and Services Procurement in North Sumatera Indonesia.* Public Policy and Administration Research. Volume 4. Nomor 12.
- Widjaja, Henry Antonius Eka. (2009). *Implementasi E-Procurement pada Rumah Sakit.* Tesis Jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Sumber Online

<http://pse.baliprov.go.id/eproc4/lelang>

(diakses pada, 1 September 2016)

<https://dispubaliprov.wordpress.com/> (diakses pada, 1 September 2016)

<http://www.baliprov.go.id/v1/>(diakses pada, 30 Agustus 2016)

Peraturan Perundang – undangan

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Unit Layanan pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali